



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

20
23

**LAPORAN
KEUANGAN**
KOMISI YUDISIAL RI
(AUDITED)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

DAFTAR ISI

KETERANGAN	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Representasi Tertulis Laporan Keuangan	ix
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
 A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum dan Peraturan	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	15
A.6. Kebijakan Akuntansi	16
A.7. Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI	24
A.8. <i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output Pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN	24
A.9. Refocussing kegiatan/realokasi Anggaran pada Komisi Yudisial RI	25
A.10. Rekonsiliasi Capaian Output Fungsi, Sub fungsi dan Prioritas Nasional pada Komisi Yudisial R.I	25
 B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	29
B.2. Belanja	36
B.3. Belanja Pegawai	37
B.4. Belanja Barang	39
B.5. Belanja Modal	40
 C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	42
C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	42

KETERANGAN	Halaman
C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka	42
C.1.3. Persediaan	45
C.2. Aset Tetap	46
C.2.1. Tanah	47
C.2.2. Peralatan dan Mesin	49
C.2.3. Gedung dan Bangunan	57
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	58
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	59
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	61
C.3 Aset Lainnya	62
C.3.1. Aset Tak Berwujud	62
C.3.2. Data Yang Dibatasi Penggunaannya	62
C.3.3. Aset Lain-lain	64
C.3.4. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	65
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	66
C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	66
C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka	67
C.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya	68
C.5. Ekuitas	68
 D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	69
D.2. Beban Pegawai	70
D.3. Beban Persediaan	71
D.4. Beban Barang dan Jasa	72
D.5. Beban Pemeliharaan	74
D.6. Beban Perjalanan Dinas	75
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	77
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	77
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	78
D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	79
D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	79
D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	79
D.13. Surplus / Defisit – LO	79
 E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	80
E.2. Surplus (Defisit) LO	80
E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	80
E.4. Transaksi Antar Entitas	80

KETERANGAN	Halaman
E.5. Ekuitas Akhir	81
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
F.1. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19	82
F.2. Transfer Masuk dari Komisi Pemberantas Korupsi	83
F.3. Hibah	85
F.4. Perolehan Lainnya	85
F.5. Kegiatan Prioritas Nasional	86
F.6. Rekening Rampungan Akhir Tahun anggaran	87
F.7. Transaksi Resiprokal	88
F.8. Pergantian Pimpinan Komisi Yudisial Paruh Kedua Juli 2023 s.d. Desember 2025	89

DAFTAR TABEL dan GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel	1	Capaian Output Strategis Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023	24
Tabel	2	<i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2023	25
Tabel	3	<i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran Tahun Anggaran 2023	25
Tabel	4	Rekonsiliasi Capaian Output Fungsi, Subfungsi dan Prioritas Nasional Komisi Yudisial Tahun 2023	27
Tabel	5	Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023	29
Tabel	6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	29
Tabel	7	Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022	35
Tabel	8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023	36
Tabel	9	Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022	38
Tabel	10	Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022	40
Tabel	11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022	41
Tabel	12	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	42
Tabel	13	Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	45
Tabel	14	Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2044	45
Tabel	15	Mutasi Tanah	47
Tabel	16	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023	48
Tabel	17	Mutasi Peralatan dan Mesin	49
Tabel	18	Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2023	56
Tabel	19	Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	56
Tabel	20	Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	56
Tabel	21	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	57
Tabel	22	Mutasi Gedung dan Bangunan	57
Tabel	23	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59
Tabel	24	Tabel Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59
Tabel	25	Mutasi Aset Tetap Lainnya	59
Tabel	26	Rincian Aset Tetap Lainnya	60
Tabel	27	Rincian Aset Tetap Renovasi	61
Tabel	28	Rincian Koreksi Pencatatan	61
Tabel	29	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023	61
Tabel	30	Mutasi Aset Tak Berwujud	62
Tabel	31	Rincian Aset Tak Berwujud	62

Tabel	32	Mutasi Aset Lain-Lain	64
Tabel	33	Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	64
Tabel	34	Usulan Penghapusan	65
Tabel	35	Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023	65
Tabel	36	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 2022	69
Tabel	37	Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	71
Tabel	38	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022	72
Tabel	39	Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022	73
Tabel	40	Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	75
Tabel	41	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022	76
Tabel	42	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 2022	77
Tabel	43	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	78
Tabel	44	Rincian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2023	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1	Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023	30
Grafik	2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022	36
Grafik	3	Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2022	36
Grafik	4	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022	39
Grafik	5	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022	40
Grafik	6	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022	41
Grafik	7	Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	46
Grafik	8	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023	71
Grafik	9	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022	72
Grafik	10	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023	74
Grafik	11	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023	75
Grafik	12	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023	76
Grafik	13	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023	78



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450,
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 15 Februari 2024
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

R. Adha Pamekas



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77

Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id

Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 144/SET/KI.01.01/05/2024 Jakarta, 7 Mei 2024
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan
Komisi Yudisial Tahun 2023

**Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta 10210**

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

5. KY memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. KY telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK KY Tahun 2023;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan KY dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;

15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2023 *Audited* sebagai asersi final Komisi Yudisial.

Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2023 (*Audited*) per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.267.798.696,00 atau mencapai 626,45 persen dengan estimasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp202.377.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp174.281.300.281,00 atau mencapai 98,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp177.206.353.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp392.933.895.158,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.186.441.933,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp385.931.728.517,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.815.724.708,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.187.050.408,00 dan Rp389.746.844.750,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp139.477.130,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp172.392.194.687,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp172.252.717.567,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp6.372.630.953,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp165.880.086.604,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp382.212.647.545,00 dikurang Defisit-LO sebesar Rp165.880.086.604,00 kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp173.089.566.085,00 serta kenaikan Ekuitas sebesar Rp7.534.197.205,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp389.746.844.750,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	202.377.000,00	1.267.798.696,00	626,45	416.291.645,00
Jumlah Pendapatan		202.377.000,00	1.267.798.696,00	626,45	416.291.645,00
B. Belanja Negara	B.2				
Belanja Pemerintah Pusat					
1. Belanja Pegawai	B.3	41.851.448.000,00	41.230.128.428,00	98,52	36.286.807.770,00
2. Belanja Barang	B.4	128.285.004.000,00	126.024.919.804,00	98,24	115.621.736.797,00
3. Belanja Modal	B.5	7.069.901.000,00	7.026.252.049,00	99,38	10.290.522.126,00
Jumlah Belanja		177.206.353.000,00	174.281.300.281,00	98,35	162.199.066.693,00

Jakarta, 7 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

NAMA AKUN	CATATAN	2023	2022
Aset			
Aset Lancar	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	153.111.567,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.2.	1.401.132.927,00	1.090.342.841,00
Persediaan	C.1.3.	2.632.197.439,00	2.594.280.820,00
Jumlah Aset Lancar		4.186.441.933,00	3.684.623.661,00
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1.	286.397.482.630,00	282.466.804.200,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	56.649.772.150,00	53.380.316.589,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	102.127.795.432,00	99.251.188.984,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	3.588.869.628,00	3.588.869.628,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	2.428.909.917,00	2.429.696.615,00
Akumulasi Penyusutan	C.2.6.	(65.261.101.240,00)	(62.444.756.140,00)
Jumlah Aset Tetap		385.931.728.517,00	378.672.119.876,00
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	2.165.701.060,00	2.165.701.060,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2.	2.696.802.508,00	0,00
Aset Lain-lain	C.3.3.	2.748.463.716,00	583.638.380,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4.	(4.795.242.576,00)	(2.600.588.015,00)
Jumlah Aset Lainnya		2.815.724.708,00	148.751.425,00
Jumlah Aset		392.933.895.158,00	382.505.494.962,00
Kewajiban	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	2.923.945.008,00	271.727.085,00
Pendapatan di terima di muka	C.4.2.	117.823.833,00	21.120.332,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.3.	145.281.567,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.187.050.408,00	292.847.417,00
Jumlah Kewajiban		3.187.050.408,00	292.847.417,00

Catatan:* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.

NAMA AKUN	CATATAN	2023	2022
Ekuitas			
Ekuitas	C.5	389.746.844.750,00	382.212.647.545,00
Jumlah Ekuitas		389.746.844.750,00	382.212.647.545,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		392.933.895.158,00	382.505.494.962,00

Jakarta, 7 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	139.477.130,00	122.140.668,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		139.477.130,00	122.140.668,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	41.168.019.178,00	36.348.917.020,00
Beban Persediaan	D.3	1.754.621.495,00	1.725.042.288,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	63.178.909.049,00	58.063.593.261,00
Beban Pemeliharaan	D.5	10.476.143.739,00	8.335.378.617,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	48.968.019.490,00	44.515.612.580,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	1.289.917.300,00	1.744.312.200,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	D.8	5.556.564.436,00	5.072.162.087,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		172.392.194.687,00	155.805.018.053,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(172.252.717.557,00)	(155.682.877.385,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	818.196.810,00	304.826.806,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	2.145.264,00	385.009.106,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		816.051.546,00	(80.182.300,00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	5.629.659.255,00	74.504.339,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	73.079.848,00	2.983.014,00
Jumlah SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		5.556.579.407,00	71.521.325,00

Catatan:* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

URAIAN	CATATAN	2023	2022
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6.372.630.953,00	(8.660.975,00)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	D.13	(165.880.086.604,00)	(155.691.538.360,00)

Jakarta, 7 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	382.212.647.545,00	365.346.957.757,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(165.880.086.604,00)	(155.691.538.360,00)
Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas			
Koreksi Nilai Persediaan		324.717.724,00	(1.950.000,00)
Koreksi Atas Reklasifikasi		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	(1.950.000,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0,00	0,00
Koreksi Lain-lain	E.3	324.717.724,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	173.089.566.085,00	172.559.178.148,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		7.534.197.205,00	16.865.689.788,00
EKUITAS AKHIR	E.5	389.746.844.750,00	382.212.647.545,00

Jakarta, 7 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

*Dasar Hukum
dan Peraturan*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
21. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
23. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran;
26. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (Unaudited);
27. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2023 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan *"checks and balances"* untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah *"Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim"*.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim dan
- b. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.

Kemudian Komisi Yudisial merumuskan tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Komisi Yudisial maka dirumuskan lah sasaran strategis komisi yudisial Tahun 2020- 2024 sebagai berikut:

- a. *Meningkatnya Integritas Hakim;*
- b. *Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal.*

Dalam rangka menunjang tugas-tugas teknis administrasi tersebut, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, seperti gambar berikut:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI



Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup
- Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Kemudian tahun 2022 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor: 01/AP.01.01/11/2021 yaitu menetapkan keputusan bahwa Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial menyetujui pembentukan 8 (delapan) kantor penghubung antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

A.4. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 (audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

*Pendapatan-
LRA*

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN).

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

*Pendapatan-
LO*

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

a. Aset Lancar*Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

- a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan
Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang
Jangka
Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nominal dan disajikan secara nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten, Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

*Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
dalam
Penanganan
Pandemi
Covid-19*

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan;
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
4. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;
5. Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



A.7 Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI

Capaian
Output
Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Output Strategis Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	100.BH	Indek Integritas Hakim	34.005.542.000	32.741.450.529	96,28%	Skor 7,68	3.556	4.442
2	100.WA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga	143.200.811.000	141.700.878.409	98,95%	Sangat Baik	1.746	2.208
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				Nilai A		
JUMLAH			177.206.353.000	174.442.328.938				

A.8 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN

Refocussing
kegiatan/
realokasi
anggaran PC
PEN

Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sektor kesehatan, Komisi Yudisial RI melakukan refocussing kegiatan/realokasi anggaran dan tidak menggunakan anggaran untuk PC PEN:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tabel 2
Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2023

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
-	-	-	-	-	-	-	-	-

A.9 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial R.I

Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial R.I

Selama periode Tahun Anggaran 2023, Komisi Yudisial telah melakukan *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran sebanyak satu kali sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tentang Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 sebesar Rp.1.824.909.000,00, dengan PAGU awal semula Rp179.031.262.000,00 menjadi Rp177.206.353.000,00.

Tabel 3
Refocussing kegiatan/realokasi anggaran Tahun Anggaran 2023

<i>Automatic Adjustment</i> (S-1040/MK.02/2022)	Blokir Belanja Pegawai	Buka Blokir Belanja Pegawai	Penyesuaian/ Pemotongan Belanja Pegawai
14.322.501.000,00	1.824.909.000,00	-	1.824.909.000,00

A.10 Rekonsiliasi Capaian Output Fungsi, Sub fungsi dan Prioritas Nasional pada Komisi Yudisial R.I

Rekonsiliasi Capaian Output Fungsi, Sub fungsi dan Prioritas Nasional Komisi Yudisial R.I

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Komisi Yudisial RI terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII. Selama periode Tahun Anggaran 2023, Komisi Yudisial R.I memiliki 4 (empat) kegiatan Prioritas Nasional dalam memperkuat stabilitas

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

polhukhankam dan transformasi pelayanan publik khususnya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata. Berikut kegiatan dan capaian *output* yang telah dilaksanakan sebagai berikut;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Tabel 4
Rekonsiliasi Capaian Output Fungsi, Subfungsi dan Prioritas Nasional Komisi Yudisial Tahun 2023

No	BA	Nama BA	Fungsi Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	100	Komisi Yudisial	03.03	PEA	Perbaikan Sistem hukum Pidana dan Perdata	BH	3872	PEA	001	Terselesaikannya (terbitnya hasil sidang pleno) terkait kegiatan Penanganan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH)	Kegiatan	Kegiatan	5.364.564.000	5.290.321.001	98,62	32	43	100%	
2	100	Komisi Yudisial	03.03	PDG	Perbaikan Sistem hukum Pidana dan Perdata	BH	3872	PDG	001	Terselenggaranya Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan	Orang	Orang	8.200.000.000	7.932.290.456	96,74	600	600	100%	
3	100	Komisi Yudisial	03.03	QIB	Perbaikan Sistem hukum Pidana dan Perdata	BH	3866	QIB	001	Penguatan dan Integritas Database Rekam Jejak Hakim	Orang	Orang	2.500.000.000	2.288.161.446	91,53	838	838	100%	
4	100	Komisi Yudisial	03.03	TBD	Perbaikan Sistem hukum Pidana dan Perdata	WA	5267	TBD	001	Pengembangan Integritas Hakim	Dokumen	Dokumen	7.000.000.000	6.924.573.433	98,92	6	6	100%	

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komisi Yudisial RI memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp179.031.262.000,00. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal yang disebabkan adanya Kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.

Selama periode berjalan, Komisi Yudisial RI telah melakukan *automatic adjustment* belanja TA 2023 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu berdasarkan:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2023 tanggal 09 Desember 2022 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023. Berdasarkan surat tersebut, maka Komisi Yudisial melakukan blokir anggaran sebesar Rp14.322.501.000 terdiri dari Belanja Pegawai Rp1.824.909.000,00 dan Belanja Barang Rp12.497.592.000,00.
2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Penyesuaian Belanja K/L yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* TA 2023. *Refocusing* belanja Komisi Yudisial diambil dari blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 yang berasal dari blokir Belanja Pegawai senilai Rp1.824.909.000,00 sehingga Alokasi Anggaran Menjadi Rp177.206.353.000,00.
3. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-367/AG/AG.4/2023 tanggal 6 September 2023 hal Pengesahan revisi buka blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, buka blokir senilai Rp12.497.592.000. Sampai dengan akhir tahun 2023 Komisi Yudisial tidak dapat membuka blokir terkait *Clearance* sebesar Rp336.000.000,00

PAGU awal Komisi Yudisial R.I yang semula Rp179.031.262.000,00 menjadi **Rp177.206.353.000,00**. Hal ini dikarenakan adanya Penyesuaian Belanja K/L yang berasal dari blokir belanja pegawai sebesar Rp1.824.909.000,00.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Tabel 5
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2023	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	202.377.000,00	202.377.000,00
Jumlah Pendapatan	202.377.000,00	202.377.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	43.676.357.000,00	41.851.448.000,00
Belanja Barang	128.285.004.000,00	128.285.004.000,00
Belanja Modal	7.069.901.000,00	7.069.901.000,00
Jumlah Belanja	179.031.262.000,00	177.206.353.000,00

Realisasi

Pendapatan

Rp1.267.798.696,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.267.798.696,00 atau mencapai 626,45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp202.377.000,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	817.396.811,00	~
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	799.999,00	~
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	202.377.000,00	225.050.000,00	111,20

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0,00	11.130.631,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	39.513.820,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	173.907.435,00	~
Jumlah	202.377.000,00	1.267.798.696,00	626,45

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023



Realisasi pendapatan per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp817.396.811,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor 125/26/2023 tanggal 20 Februari 2023, NTPN Nomor:7317F61QUQBPO6D6 tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp225.295.564,00;
 - b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor 126/26/2023 tanggal 20 Februari 2023, NTPN Nomor:3F10C55DEVPEGHPB tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp247.060.697,00;
 - c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor 124/26/2023 tanggal 27 Februari 2023, NTPN

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- Nomor:40FD248VV5776TVG tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp236.186.775,00;
- d. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL-498/26/2023 tanggal 20 Juni 2023, NTPN Nomor:A138F3CIFB0IGRO3 tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp75.600.999,00;
 - e. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL-1436/04/2023 tanggal 04 Oktober 2023, NTPN Nomor: 9B67A0N9VRKRIUQQ tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp1.777.777,00;
 - f. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL-519/76/2023 tanggal 17 Oktober 2023, NTPN Nomor: 733522G4VGQ1G85S tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp3.475.000,00;
 - g. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL-1273/26/2023 tanggal 18 Desember 2023, NTPN Nomor: 582731JNFMDRK3LB tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp27.999.999,00.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sesuai Nomor Lelang:1364/45/2023 NTPN Nomor: 62E2661QUUQJ68II Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp799.999,00.
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp225.050.000,00. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan terdiri dari:
- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Ruang ATM dan Kantor BRI di Gedung Komisi Yudisial Perjanjian Nomor: PERJ-02/BU.KY/09/2022 tanggal 26 September 2022 adendum pertama sewa menyewa sebagian gedung untuk kantor kas dan ATM BRI Nomor: PERJ-03/BU.KY/02/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan periode sewa 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp193.257.000,00, NTPN Nomor: BE5933CIFAHGJDNT tanggal 17 Januari 2023;
 - b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Kantin sesuai Perjanjian Nomor: Perj-01/BU.KY/09/2023,

dengan periode sewa 01 September 2023 s.d 31 Agustus 2024
NTPN Nomor:4066A61QUR9AI00E dengan kontrak sebesar
Rp31.793.000,00

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp39.513.820,00 berupa:
 - a. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan Oktober 2022 s.d. Maret Tahun 2023 untuk 3 pegawai / 8 jiwa, SP2D Nomor: 231331305001127 tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp2.730.300,00;
 - b. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan Oktober 2022 s.d. Maret Tahun 2023 untuk 61 pegawai / 150 jiwa, SP2D Nomor: 231331301008837 tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp36.782.800,00;
 - c. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan Mei 2022 s.d. Februari Tahun 2023 untuk 5 pegawai / 17 jiwa, SP2D Nomor: 231331301008838 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp340,00;
 - d. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. M Periode Bulan Maret 2020 s.d. Maret Tahun 2022 untuk 1 pegawai / 2 jiwa, SP2D Nomor: 231331301019821 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp380,00.
5. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp11.130.631,00 berupa:
 - a. Pendapatan denda sesuai Kontrak No.577/PERJ/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 08 Desember 2023 sesuai No SPM 00611/439479/2023 senilai Rp10.256.757,00;
 - b. Pendapatan denda sesuai Kontrak No.712/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 27 November 2023 sesuai NTPN Nomor: 75A126U8ELS89DQ1 senilai Rp873.874,00.
6. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp173.907.435,00 berupa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP senilai Rp173.907.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Nomor: 41/LHK/PK/KI.01.01.12/2022 a.n CV.AK sesuai NTPN Nomor: 035DA7QLUFG6QK30 Tanggal 13 Februari 2023 sebesar Rp1.421.006,00;
- b. Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sesuai NTPN Nomor: 7B4258N3EA5KO72R Tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp3.956.600,00;
- c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: A06848N3EA5KOCC7 Tanggal 11 Maret 2023 sebesar Rp675.000,00 TLHP BPK RI a.n PT MIJ;
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 7AF0D0N9VR0N25K8 Tanggal 01 April 2023 sebesar Rp6.505.960,00 TLHP BPK RI a.n PT. MIC;
- e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 264720N9VR0N24A4 Tanggal 03 April 2023 sebesar Rp4.500.000,00 TLHP BPK RI a.n CV. TOP;
- f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: E11ED48VV5A8M5UE Tanggal 03 April 2023 sebesar Rp19.951.384,00 TLHP BPK RI a.n PT. KC;
- g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 4D5798N3EA94QPJ3 Tanggal 28 April 2023 sebesar Rp5.525.000,00 TLHP BPK RI Honor Kegiatan a.n S;
- h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: C0C8961QUQKE5KA6 Tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp29.078.714,00 TLHP BPK RI a.n PT. AP;
- i. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 0BE6B6U8EL6VVRGD Tanggal 16 Mei 2023 sebesar Rp1.453.646,00 TLHP BPK RI a.n RPK;
- j. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 1B2927QLUFPDHEGA Tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp2.850.000,00 TLHP BPK RI a.n DT;
- k. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: AB9366U8EL78KDK5 Tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp13.305.130,00 TLHP BPK RI Tahap I a.n PT. DC;

- l. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 024CB1JNFLOLHR6E Tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp300,00 TLHP BPK RI a.n PT. MIC;
- m. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: DDF8E61QUQKJIQ8D Tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp4.841.694,00 TLHP BPK RI a.n PT. TD;
- n. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: BFDC83CIFATEBQRP Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp5.703.840,00 TLHP BPK RI a.n PT. DWRK;
- o. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: E9A821JNFLOS0CR9 Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp3.975.000,00 TLHP BPK RI terkait Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- p. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 8C6F355DF02DKFIJ Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp300.000,00 TLHP BPK RI terkait Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- q. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Nomor: sesuai NTPN Nomor: 6EBE361QUQNASL8A Tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp2.393.640,00;
- r. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 9085E1JNFLRCPTAF Tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp13.305.130,00 TLHP BPK RI Tahap II a.n PT. DC;
- s. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 728382G4VGGLK7GS Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp4.750.000,00 terkait Honor SK a.n SI;
- t. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 4E9786U8ELCTI5CD Tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp13.305.130,00 TLHP BPK RI Tahap III a.n PT. DC;
- u. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 792E755DF0APSJNB Tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp13.305.130,00 TLHP BPK RI Tahap IV a.n PT. DC;
- v. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 992268N3EANA AHB Tanggal 08 September 2023 sebesar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Rp13.305.130,00 TLHP BPK RI Tahap V a.n PT. DC;

w. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 51B0755DF0MU4LOT Tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp4.750.000,00 TLHP BPK RI a.n APJ;

x. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: CD8D3CIFBID4F4B Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp1,00 TLHP BPK RI a.n PT.AP;

y. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 72EAE6U8ELRUOEEJ Tanggal 24 Desember 2023 sebesar Rp4.750.000,00 TLHP BPK RI a.n ED.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 204,55 persen. Kenaikan pendapatan sebagian besar bersumber dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Tabel 7
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

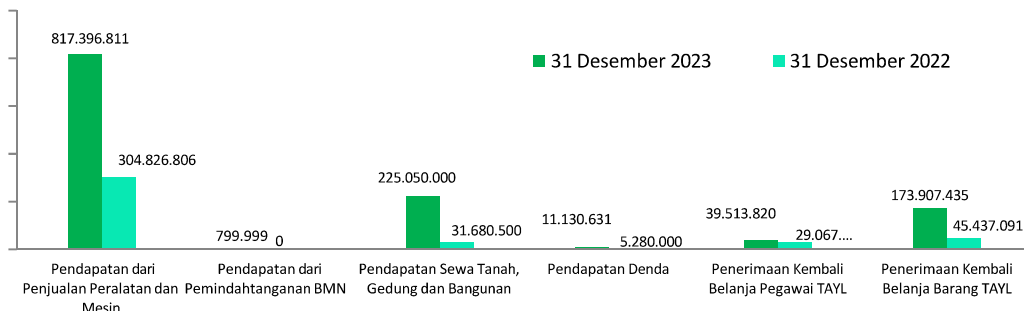
<i>Uraian Akun</i>	<i>Realisasi 31 Desember 2023</i>	<i>Realisasi 31 Desember 2022</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
<i>Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin</i>	<i>817.396.811,00</i>	<i>304.826.806,00</i>	<i>168,15</i>
<i>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</i>	<i>799.999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>~</i>
<i>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</i>	<i>225.050.000,00</i>	<i>31.680.500,00</i>	<i>610,37</i>
<i>Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah</i>	<i>11.130.631,00</i>	<i>5.280.000,00</i>	<i>110,81</i>
<i>Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL</i>	<i>39.513.820,00</i>	<i>29.067.248,00</i>	<i>35,94</i>
<i>Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL</i>	<i>173.907.435,00</i>	<i>45.437.091,00</i>	<i>282,74</i>
<i>Jumlah</i>	<i>1.267.798.696,00</i>	<i>416.291.645,00</i>	<i>204,55</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Grafik 2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022



Realisasi Belanja

Rp174.281.300.281,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Komisi Yudisial pada Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp174.281.300.281,00 atau 98,35 persen dari anggaran belanja sebesar Rp177.206.353.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

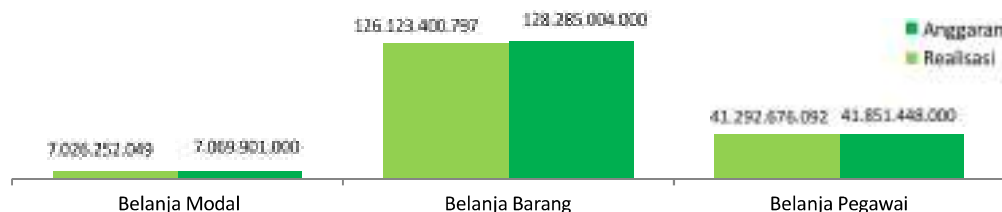
Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	41.851.448.000,00	41.292.676.092,00	98,66
Belanja Barang	128.285.004.000,00	126.123.400.797,00	98,31
Belanja Modal	7.069.901.000,00	7.026.252.049,00	99,38
Total Belanja Kotor	177.206.353.000,00	174.442.328.938,00	98,44
Pengembalian Belanja	0,00	(161.028.657,00)	~
Jumlah	177.206.353.000,00	174.281.300.281,00	98,35

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3
Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.082.233.588,00 atau 7,45 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

- Peningkatan belanja pegawai dikarenakan kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil, Penambahan pegawai di Penghubung Komisi Yudisial, serta Pengangkatan Pegawai (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Peningkatan belanja barang disebabkan adanya belanja untuk operasional perkantoran belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi Komisi Yudisial RI

Belanja Pegawai
Rp41.230.128.428,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.230.128.428,00 dan Rp36.286.807.770,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.943.320.658,00 atau 13,62 persen dari 31 Desember 2022. Kenaikan realisasi belanja pegawai disebabkan:

1. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penghubung Komisi Yudisial.
2. Perubahan status pegawai Komisi Yudisial RI yang semula sebagai Pelaksana/Fungsional Umum sebagian besar telah menjadi Fungsional Tertentu.
3. Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9 (sembilan) orang. Penambahan pegawai tersebut sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Nomor 126 Tahun 2023 tentang pengangkatan calon pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi		Naik
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	8.858.106.580,00	8.979.030.370,00	(1,35)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	140.863,00	155.357,00	(9,33)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	589.532.570,00	572.831.580,00	2,92
Belanja Tunj. Anak PNS	167.034.344,00	158.383.668,00	5,46
Belanja Tunj. Struktural PNS	555.640.000,00	624.060.000,00	(10,96)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.307.152.000,00	495.586.000,00	163,76
Belanja Tunj. PPh PNS	47.017.063,00	38.337.326,00	22,64
Belanja Tunj. Beras PNS	495.642.480,00	488.907.420,00	1,38
Belanja Uang Makan PNS	961.902.000,00	949.965.000,00	1,26
Belanja Tunjangan Umum PNS	181.700.000,00	305.585.000,00	(40,54)
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	429.240.000,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	6.320,00	6.320,00	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	25.032.000,00	25.284.000,00	(1,00)
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	5.174.400,00	5.174.400,00	0,00
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.464.136.000,00	6.464.136.000,00	0,00
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2.201.465.456,00	2.211.562.900,00	(0,46)
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	15.208.200,00	14.121.900,00	7,69
Belanja Gaji Pokok PPPK	106.794.000,00	0,00	~
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.776,00	0,00	~
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	7.119.600,00	0,00	~
Belanja Tunj. Anak PPPK	2.135.880,00	0,00	~
Belanja Tunj. Fungsional PPK	19.200.000,00	0,00	~

Catatan:

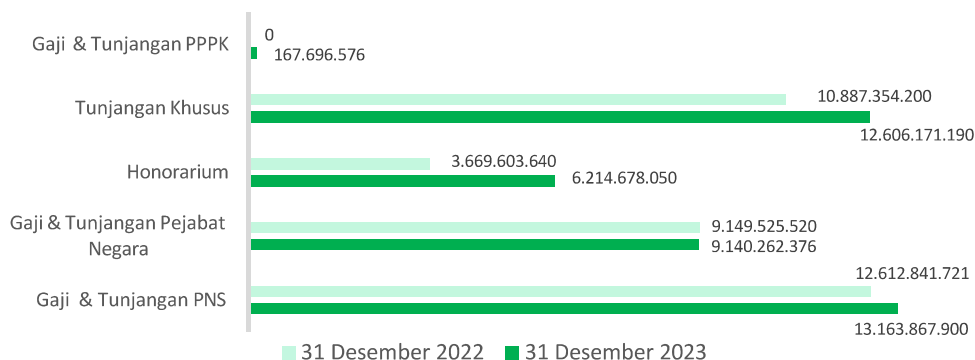
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Uraian Jenis Belanja	Realisasi		Naik
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Turun) %
Belanja Tunj. Beras PPPK	6.952.320,00	0,00	~
Belanja Uang Makan PPPK	25.493.000,00	0,00	~
Belanja Uang Honor Tetap	6.214.678.050,00	3.669.603.640,00	69,36
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	12.443.847.190,00	10.887.354.200,00	14,30
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus /Kegiatan /Kinerja PPPK	162.324.000,00	0,00	~
Jumlah Belanja Bruto	41.292.676.092,00	36.319.325.081,00	13,69
Pengembalian Belanja Pegawai	(62.547.664,00)	(32.517.311,00)	92,35
Jumlah Belanja Netto	41.230.128.428,00	36.286.807.770,00	13,62

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 4
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022



Belanja Barang

Rp126.024.919.804,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp126.024.919.804,00 dan Rp115.621.736.797,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.403.183.797,00 atau 9,00 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Kenaikan belanja tersebut disebabkan peningkatan belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi Komisi Yudisial RI.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



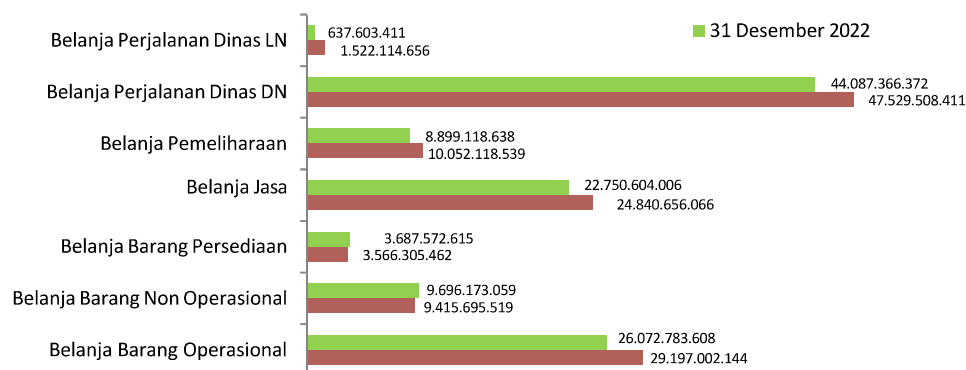
Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/ (Turun)
<i>Belanja Barang Operasional</i>	<i>29.197.002.144,00</i>	<i>26.072.783.608,00</i>	<i>11,98</i>
<i>Belanja Barang Non Operasional</i>	<i>9.415.695.519,00</i>	<i>9.696.173.059,00</i>	<i>(2,89)</i>
<i>Belanja Barang Persediaan</i>	<i>3.566.305.462,00</i>	<i>3.687.572.615,00</i>	<i>(3,29)</i>
<i>Belanja Jasa</i>	<i>24.840.656.066,00</i>	<i>22.750.604.006,00</i>	<i>9,19</i>
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>10.052.118.539,00</i>	<i>8.899.118.638,00</i>	<i>12,96</i>
<i>Belanja Perjalanan Dinas DN</i>	<i>47.529.508.411,00</i>	<i>44.087.366.372,00</i>	<i>7,81</i>
<i>Belanja Perjalanan Dinas LN</i>	<i>1.522.114.656,00</i>	<i>637.603.411,00</i>	<i>138,72</i>
Realisasi Belanja Barang Bruto	126.123.400.797,00	115.831.221.709,00	8,89
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>(98.480.993,00)</i>	<i>(209.484.912,00)</i>	<i>(52,99)</i>
Realisasi Belanja Barang Netto	126.024.919.804,00	115.621.736.797,00	9,00

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022



Belanja Modal

Rp7.026.252.049,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.026.252.049,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.264.270.077,00 atau 31,72 persen bila dibandingkan dengan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.290.522.126,00 disebabkan tahun 2023 penurunan pembelian Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	197.825.000,00	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.570.657.069,00	7.646.380.771,00	(27,15)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.953.411.000,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	999.640.330,00	0,00	~
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	98.100.000,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	455.954.650,00	394.805.355,00	15,49
Jumlah Belanja Bruto	7.026.252.049,00	10.290.522.126,00	(31,72)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	~
Jumlah Belanja Netto	7.026.252.049,00	10.290.522.126,00	(31,72)

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 6
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022

**Catatan:**

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. Aset Lancar**

Aset Lancar
Rp4.186.441.933,00

Jumlah Aset Lancar Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.186.441.933,00 dan Rp3.684.623.661,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp153.111.567,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp153.111.567,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembayaran pada pihak ketiga dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat beberapa kendala dalam proses penyetoran.

Tabel 12
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam rupiah)

Pembayaran yang belum dilakukan kepada Pihak ketiga	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	Total
7.830.000	80.091.450	48.135.456	3.174.229	13.880.432	153.111.567

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- Pembayaran Dana Operasional Pimpinan senilai Rp7.830.000,00;
- Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp80.091.450,00;
- Pajak Penghasilan Pasal 21 senilai Rp48.135.456,00;
- Pajak Penghasilan Pasal 22 senilai Rp3.174.229;
- Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai Rp13.880.432,00.

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp1.401.132.927,00 dan Rp1.090.342.841,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Rp1.401.132.927,00

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

- a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp187.210.691,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sesuai Perjanjian Nomor: 43/Perj/PPK-1.KY/01/2023 tanggal 15 Januari 2023 periode sewa 15 Januari 2023 s.d. 14 Januari 2025 sebesar Rp360.134.000,00;
- b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp68.959.172,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 457/SPK/PPK-1.KY/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 periode sewa 15 Agustus 2023 s.d. 15 Agustus 2024 sebesar Rp111.000.000,00;
- c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.299.094,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai Kontrak Nomor: 470/SPK/PPK-1.KY/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 periode sewa 21 Agustus 2023 s.d. 21 Agustus 2024 sebesar Rp154.170.000,00;
- d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp92.668.593,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sesuai Kontrak Nomor: 571/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan periode sewa 02 Oktober 2023 s.d. 01 Oktober 2024 sebesar Rp123.333.500,00;
- e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp137.342.475,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 616B/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 periode sewa 18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2024 sebesar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Rp172.740.000,00;
- f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp142.187.725,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Jayapura Provinsi Papua. Sesuai Kontrak Nomor: 618/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan periode sewa 18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2024 sebesar Rp178.834.000,00;
- g). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp156.896.250,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Lampung Provinsi Bandar Lampung. Sesuai Kontrak Nomor: 616A/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dengan periode sewa 18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2024 sebesar Rp197.333.400,00;
- h). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.734.179,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai Kontrak Nomor: 625/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan periode sewa 20 Oktober 2023 s.d. 19 Oktober 2024 sebesar Rp123.333.500,00;
- i). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp114.065.584,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai Kontrak Nomor: 628/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 21 Oktober 2023 periode sewa 21 Oktober 2023 s.d. 20 Oktober 2024 sebesar Rp142.000.000,00;
- j). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp110.764.440,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku. Sesuai Kontrak Nomor: 741/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 periode sewa 12 Desember 2023 s.d. 11 Desember 2024 sebesar Rp117.167.000,00;
- k). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp99.391.792,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Kontrak Nomor:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

703A/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 periode sewa 13 Desember 2023 s.d. 12 Desember 2024 sebesar Rp104.834.000,00;

- l). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp94.612.932,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 703B/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 periode sewa sewa 14 Desember 2023 s.d. 13 Desember 2024 sebesar Rp99.506.700,00.

C.1.3. Persediaan

Persediaan

Rp2.632.197.439,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.632.197.439,00 dan Rp2.594.280.820,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

No	Jenis	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	1.193.338.788,00	1.480.991.862,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	192.859.800,00	124.187.800,00
3	Suku Cadang	104.929.500,00	132.032.000,00
4	Bahan Baku	21.602.700,00	14.013.500,00
5	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	987.758.000,00	541.530.300,00
6	Persediaan Lainnya	131.708.651,00	301.525.358,00
Jumlah		2.632.197.439,00	2.594.280.820,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 7

Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



Dalam pencatatan persediaan Tahun 2023, terdapat persediaan usang Tahun Anggaran 2023 berupa obat-obatan senilai Rp73.264.908,00. Persediaan usang tersebut akan diusulkan penghapusan di Tahun 2023, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 14
Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis	Unit	Jumlah
1	Kertas Fax	133	1.148.455,00
2	Karbon Fax FA93A KX-FA57E	20	605.000,00
3	HP Laserjet 6001 A Blue	6	4.989.600,00
4	HP Laserjet 6002 A Yellow	3	2.494.800,00
5	HP Laserjet 6003 A Magenta	4	3.326.400,00
6	Toner Fax Panasonic KX-FAT92	8	2.879.800,00
7	Folavit 400	100	185.060,00
8	Metronidazole	181	45.793,00
9	Favipiravir	3.070	52.190.000,00
10	Rapid Tes vivadiag	30	5.400.000,00
Jumlah			73.264.908,00

Aset Tetap

Rp385.931.728.517,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp385.931.728.517,00 dan Rp378.672.119.876,00 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Komisi Yudisial berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

C.2.1. Tanah

Tanah

Rp286.397.482.630,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp286.397.482.630,00 dan Rp282.466.804.200,00.

Tabel 15
Mutasi Tanah

		(dalam rupiah)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	:	282.466.804.200,00
Mutasi Tambah:		
Hibah Masuk	:	70.259.500,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	:	44.469.930,00
Perolehan Lainnya	:	3.815.949.000,00
Koreksi Pencatatan	:	197.825.000,00
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan	:	(197.825.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	286.397.482.630,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	:	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	:	286.397.482.630,00

Mutasi Tanah:

1. Mencatat Hibah Masuk dari Provinsi Jawa Tengah dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Nomor 030/0001826 dan Nomor: 01/BAST/SET/PK.02.01/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 berupa tanah senilai Rp.70.259.500,00 dengan luas sebesar 354 m² terletak di Jalan Pamularsih No.10 Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Mencatat Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai Rp44.469.930,00 berupa pekerjaan perapihan dan pengurukan Kantor Penghubung Kalimantan Barat sesuai kuitansi nomor: 680/K/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 15 November 2023;
3. Mencatat Perolehan Lainnya dari Kementerian Keuangan sesuai BAST Nomor: BA-46/KN/2023 tanggal 06 Juni 2023 berupa tanah di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai Laporan Penilaian Nomor: Lap-0437/1/PRO-01/KNL.0702/01.01.00/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tanah

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.

senilai 254m² senilai Rp3.815.949.000,00;

4. Koreksi Pencatatan, tahun 2023 Komisi Yudisial melakukan pengurukan tanah di tanah Komisi Yudisial yang terletak di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kota Tangerang, pada saat pencatatan kedalam Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap, tahun 2022 terdapat NUP baru. Tahun 2023 melakukan koreksi pencatatan sebesar Rp.197.825.000,00 dengan cara mengurangi di NUP yang baru dan mencatat di NUP yang sesuai dengan NUP tersebut.

Tabel 16
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Kode	NUP	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	1	5.780 m ²	270.849.552.000,00
2	2.01.01.04.001	2	730 m ²	1.808.956.000,00
3	2.01.01.04.001	3	46 m ²	3.415.915.000,00
4	2.01.01.04.001	4	56 m ²	3.370.089.000,00
5	2.01.01.04.001	5	2.361 m ²	708.300.000,00
6	2.01.01.04.001	6	332 m ²	2.358.462.130,00
7	2.01.01.04.001	7	354 m ²	70.259.500,00
8	2.01.01.04.001	8	254 m ²	3.815.949.000,00
Jumlah				286.397.482.630,00

Rincian letak Tanah Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat;
2. Tanah seluas 730 m² terletak di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
3. Tanah seluas 332 m² terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrachman, Pontianak, Kalimantan Barat;
4. Tanah seluas 2.361 m² terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur;
5. Tanah seluas 46 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
6. Tanah seluas 56 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Nomor H-12 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
7. Tanah seluas 354 m² terletak di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
8. Tanah seluas 254 m² terletak di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp56.649.772.150,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp56.649.772.150,00 dan Rp53.380.316.589,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.287.004.523,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp46.362.767.627,00.

Tabel 17
Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	:	53.380.316.589,00
Mutasi Tambah:		
Pembelian	:	5.712.056.369,00
Perolehan Lainnya	:	2.750.000,00
Mutasi Kurang:		
Penghentian Aset Dari Penggunaan	:	(2.393.622.651,00)
Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	:	(31.228.157,00)
Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	:	(20.500.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2023	:	56.649.772.150,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	:	(46.362.767.627,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	:	10.287.004.523,00

Mutasi Tambah:

a. Pembelian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 senilai Rp5.712.056.369,00 sebagai berikut:

1. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 2/SPK/PPK-1.KY/03/2023 sesuai dengan SPM Tanggal 14 April 2023 Nomor: 00137/KYRI/2023, SP2D Tanggal 17 April 2023 Nomor: 231331301013920 sebesar Rp194.993.700,00;
2. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 306/SPK/PPK-1.KY/05/2023 sesuai dengan SPM Tanggal 04

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Juli 2023 Nomor: 00266/KYRI/2023, SP2D Tanggal 06 Juli 2023, Nomor: 231331302011952 sebesar Rp523.400.000,00;
3. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. BAST Nomor: 285A/SPK/PPK-1.KY/04/2023 tanggal 10 April 2023, sesuai dengan SPM Tanggal 07 Juli 2023 Nomor: 00270/KYRI/2023, SP2D Tanggal 07 Juli 2023, Nomor: 231331301026198 sebesar Rp10.000.000,00;
 4. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. BAST Nomor: 137/SPK/PPK-1.KY/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sesuai dengan SPM Tanggal 07 Juli 2023 Nomor: 00270/KYRI/2023, SP2D Tanggal 07 Juli 2023, Nomor: 231331301026198 sebesar Rp11.000.000,00;
 5. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 392/SPK/PPK-1.KY/07/2023 tanggal 13 Juli 2023, sesuai dengan SPM Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 00296/KYRI/2023, SP2D Tanggal 27 Juli 2023, Nomor: 231331302013626 sebesar Rp129.545.880,00;
 6. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 263/SP/PPK-1.KY/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sesuai dengan SPM Tanggal 02 Agustus 2023 Nomor: 00321/KYRI/2023, SP2D Tanggal 04 Agustus 2023, Nomor: 231331302014651 sebesar Rp1.368.276.600,00;
 7. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 262/SP/PPK-1.KY/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sesuai dengan SPM Tanggal 11 Agustus 2023 Nomor: 00331/KYRI/2023, SP2D Tanggal 15 Agustus 2023, Nomor: 231331302015551 sebesar Rp817.984.400,00;
 8. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. sesuai dengan SPM Tanggal 11 Agustus 2023 Nomor: 00332/KYRI/2023, SP2D Tanggal 15 Agustus 2023, Nomor: 231331301032615 sebesar Rp24.000.000,00;
 9. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 419/SPK/PPK-1.KY/07/2023 tanggal 27 Juli 2023, sesuai dengan SPM Tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: 00362/KYRI/2023, SP2D Tanggal 28 Agustus 2023,

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Nomor:231331302016547 sebesar Rp84.700.000,00;
10. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPM Tanggal 07 September 2023 Nomor: 00379/KYRI/2023, SP2D Tanggal 07 September 2023, Nomor: 231331301035484 sebesar Rp32.120.000,00;
 11. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPM Tanggal 19 September 2023 Nomor: 00408/KYRI/2023, SP2D Tanggal 19 September 2023, Nomor:231331301038035 sebesar Rp126.100.000,00;
 12. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPK Nomor 344.A/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00387/KYRI/2023, SP2D Tanggal 05 Oktober 2023, Nomor:231331301040467 sebesar Rp87.995.000,00;
 13. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPK Nomor 344.B/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00388/KYRI/2023, SP2D Tanggal 05 Oktober 2023, Nomor:231331301040468 sebesar Rp162.829.000,00;
 14. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPK Nomor 344.C/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00389/KYRI/2023, SP2D Tanggal 05 Oktober 2023, Nomor:231331301040469 sebesar Rp112.160.000,00;
 15. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPK Nomor 344.D/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00390/KYRI/2023, SP2D Tanggal 05 Oktober 2023, Nomor:231331301040470 sebesar Rp113.044.000,00;
 16. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPK Nomor 344.E/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00435/KYRI/2023, SP2D Tanggal 09 Oktober 2023, Nomor:231331301040903 sebesar Rp164.605.012,00;
 17. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- SPK Nomor 344.F/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00436/KYRI/2023, SP2D Tanggal 09 Oktober 2023, Nomor:231331301040904 sebesar Rp109.150.630,00;
18. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPK Nomor 344.G/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00437/KYRI/2023, SP2D Tanggal 09 Oktober 2023, Nomor:231331301040894 sebesar Rp141.936.403,00;
19. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan SPK Nomor 344.H/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00438/KYRI/2023, SP2D Tanggal 09 Oktober 2023, Nomor:231331301040895 sebesar Rp58.647.514,00;
20. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., SPM Tanggal 12 Oktober 2023 Nomor: 00459/KYRI/2023, SP2D Tanggal 12 Oktober 2023, Nomor: 231331301042065 sebesar Rp8.500.000,00;
21. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai kuitansi Nomor: 127/KWT/KCM/IX/2023 Tanggal 05 September 2023, SPM Tanggal 12 Oktober 2023 Nomor: 00459/KYRI/2023, SP2D Tanggal 12 Oktober 2023, Nomor: 231331301042065 sebesar Rp9.850.000,00;
22. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai kuitansi Nomor: 631/K/PPK-1/10/2023 Tanggal 05 Oktober 2023, SPM Tanggal 27 Oktober 2023 Nomor: 00481/KYRI/2023, SP2D Tanggal 27 Oktober 2023, Nomor: 231331301044965 sebesar Rp12.000.000,00;
23. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Kuitansi Nomor: 626/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 17 Oktober 2023, SPM Tanggal 29 November 2023 Nomor: 00544/KYRI/2023, SP2D Tanggal 29 November 2023, Nomor: 231331301051506 sebesar Rp46.958.000,00;
24. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Kuitansi Nomor: 627/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 17 Oktober

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 2023, SPM Tanggal 29 November 2023 Nomor: 00544/KYRI/2023, SP2D Tanggal 29 November 2023, Nomor: 231331301051506 sebesar Rp49.278.450,00;
25. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Kuitansi Nomor: 636/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, SPM Tanggal 29 November 2023 Nomor: 00544/KYRI/2023, SP2D Tanggal 29 November 2023, Nomor: 231331301051506 sebesar Rp32.706.400,00;
26. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Faktur Nomor: 012/SMS/FAK/IX/2023 Tanggal 08 September 2023, SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701002276 sebesar Rp26.725.000,00;
27. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 446/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 09 Agustus 2023, SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701002276 sebesar Rp52.250.000,00;
28. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 574/SPK/PPK-1.KY/10/2023, SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701002276 sebesar Rp72.000.000,00;
29. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Kuitansi Nomor: 644/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 03 Oktober 2023, SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701002276 sebesar Rp50.172.000,00;
30. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai kuitansi nomor: 027/KWT-MCP/VIII/2023, Tanggal 03 Agustus 2023, SPM Tanggal 06 Desember 2023 Nomor: 00563/KYRI/2023, SP2D Tanggal 07 Desember 2023, Nomor: 231331301053380 sebesar Rp34.400.000,00;
31. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 718/Perj/PPK-1.KY/11/2023 Tanggal 30 November

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 2023 SPM Tanggal 13 Desember 2023 Nomor: 00627/KYRI/2023, SP2D Tanggal 15 Desember 2023, Nomor: 231331302029118 sebesar Rp345.975.000,00;
32. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Kuitansi Nomor: 643/K/PPK-1.KY/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00627/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004005 sebesar Rp31.500.000,00;
33. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 354/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00627/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004005 sebesar Rp105.500.000,00;
34. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Faktur Nomor: 064-FR/XI/CLA-2023, tanggal 29 November 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00627/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004005 sebesar Rp8.250.000,00;
35. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 468/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp62.700.000,00;
36. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 807/SPK/PPK-1.KY/09/2023 Tanggal 25 September 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp49.617.000,00;
37. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Nomor Faktur: 180/Fak/RKU/XI/2023 tanggal 20 November 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp40.750.000,00;
38. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Kuitansi Nomor: 698/K/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 28

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- November 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp38.437.080,00;
39. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 728/SPK/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 05 Desember 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp166.000.000,00;
40. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 739/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp90.678.900,00;
41. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 742/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp50.720.400,00;
42. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK Nomor: 748/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 31 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp54.600.000,00.
- b. Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 senilai Rp2.750.000,00 pengadaan aset peralatan dan mesin pembeliannya menggunakan akun pemeliharaan gedung dan bangunan.

Tabel 18
Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Bantu	12	71.692.547,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	5	2.186.261.000,00
3	Alat Bengkel Bermesin	1	1.375.000,00
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	3	5.750.000,00
5	Alat Kantor	53	414.754.442,00
6	Alat Rumah Tangga	187	1.334.048.486,00
7	Alat Studio	64	463.655.286,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
8	Alat Komunikasi	20	194.993.700,00
9	Alat Kedokteran	4	68.000.000,00
10	Unit Alat Laboratorium	15	144.992.924,00
11	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	2	4.363.386,00
12	Alat Khusus Kepolisian	1	2.250.000,00
13	Komputer Unit	5	76.254.620,00
14	Peralatan Komputer	60	686.436.821,00
15	Alat Kerja Penerbangan	3	8.250.000,00
Jumlah			5.663.078.212,00

Tabel 19
Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Kantor	20	10.139.792,00
2	Alat Rumah Tangga	32	18.187.788,00
3	Alat Khusus Kepolisian	2	133.970,00
4	Peralatan Komputer	5	1.232.747,00
5	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2	1.533.860,00
Jumlah			31.228.157,00

Tabel 20
Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Gedung dan Bangunan	1	20.500.000,00
Jumlah			20.500.000,00

Tabel 21
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Kantor	12	89.182.280,00
2	Alat Rumah Tangga	146	775.072.666,00
3	Alat Studio	14	159.399.300,00
4	Alat Komunikasi	13	43.132.515,00
5	Alat Kedokteran	1	1.835.000,00
6	Unit Alat Laboratorium	1	3.500.000,00
7	Alat Khusus Kepolisian	4	6.820.000,00
8	Komputer Unit	102	1.053.612.310,00
9	Peralatan Komputer	34	231.567.260,00
10	Alat Kerja Penerbangan	5	29.501.320,00
Jumlah			2.393.622.651,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp102.127.795.432,00

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp102.127.795.432,00 dan Rp99.251.188.984,00. Nilai Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.231.803.848,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp14.895.991.584,00).

Tabel 22
Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	99.251.188.984,00
Mutasi Tambah:	0,00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	904.450.000,00
Perolehan Lainnya	1.600.289.000,00
Koreksi Pencatatan	371.867.448,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	102.127.795.432,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(14.895.991.584,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	87.231.803.848,00

Mutasi tambah

a. Pengembangan Nilai Aset Langsung:

1. Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Komisi Yudisial R.I., sesuai kuitansi nomor: sesuai kontrak No.503/Perj/PPK-1.KY/09/2023, Tanggal 07 September 2023 Pekerjaan Pengadaan *Vertical/Roller Blind* Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023, SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00429/KYRI/2023, SP2D Tanggal 05 Oktober 2023, Nomor: 231331302019688 sebesar Rp409.450.000,00;
2. Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Komisi Yudisial R.I., sesuai kontrak No.577/Perj/PPK-1.KY/10/2023, Tanggal 04 Oktober 2023 Pekerjaan Pos *Security* Pintu Masuk Dan Keluar Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023, SPM Tanggal 21 Desember 2023 Nomor: 00611/KYRI/2023, SP2D Tanggal 28 Desember 2023 Nomor: 231331302030236 sebesar Rp495.000.000,00;
3. Mencatat Perolehan Lainnya dari Kementerian Keuangan sesuai BAST Nomor: BA-46/KN/2023 tanggal 06 Juni 2023 berupa

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Bangunan di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai Laporan Penilaian Nomor:Lap-0437/1/PRO-01/KNL.0702/01.01.00/2023 Tanggal 28 Desember 2023 bangunan seluas 855m² senilai Rp1.600.289.000,00.

b. Koreksi Pencatatan

Koreksi Pencatatan senilai 371.867.448,00 terdiri dari:

1. Aset Tetap Renovasi yang sudah diserahkan dari Pemerintah Daerah menjadi Kantor Penghubung Nusa Tenggara Timur senilai Rp203.872.448,00;
2. Aset Tetap Renovasi yang sudah diserahkan dari Pemerintah Daerah menjadi Kantor Penghubung Jawa Tengah senilai Rp117.079.000,00 dan Nilai Ekstrakomtabel Kantor Penghubung senilai Rp5.805.000,00;
3. Renovasi ruang Ketua Komisi Yudisial RI senilai Rp45.111.000,00;

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp3.588.869.628,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.588.869.628,00 dan Rp3.588.869.628,00. Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.263.422,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp3.496.606.206,00).

Tabel 23
Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	3.588.869.628,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	3.588.869.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(3.496.606.206,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	96.263.422,00

Tabel 24
Tabel Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Instalasi Generating Set	2	2.617.280.034,00
2	Jaringan Building Automation System	1	803.853.994,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
3	Jaringan Listrik Lainnya	1	19.309.000,00
4	Jaringan Dengan Media Udara Lainnya	1	38.760.000,00
5	Jaringan Telepon Lainnya	3	109.666.600,00
Jumlah			3.588.869.628,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp2.428.909.917,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.428.909.917,00 dan Rp2.429.696.615,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Netto Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.923.174.094,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp505.735.823,00).

Tabel 25
Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	2.429.696.615,00
Mutasi Tambah:	0,00
Pembelian	365.275.750,00
Mutasi Kurang:	0,00
Koreksi Pencatatan	(366.062.448,00)
Saldo per 31 Desember 2023	2.428.909.917,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(505.735.823,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	1.923.174.094,00

Mutasi Tambah:

1. Renovasi Rumah Dinas Pimpinan pekerjaan pembuatan ruang istirahat Patwal Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2023 di Kemanggisan Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 429/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701002276 sebesar Rp90.101.250,00;
2. Renovasi Ruang Tamu Rumah Dinas Kediaman Ketua Komisi Yudisial di Kemanggisan Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 445/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701002276 sebesar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Rp151.138.500,00;

3. Renovasi Ruang Tamu Rumah Dinas Kediaman Ketua Komisi Yudisial di Kemanggisan Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 444/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701002276 sebesar Rp78.925.000,00.
4. Renovasi Rumah Dinas Pimpinan berupa ruang istirahat Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2023 Komisi Yudisial di Kemanggisan Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 558/K/PPK-1.KY/09/2023 Tanggal 04 September 2023 SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, SP2D Tanggal 01 Desember 2023, Nomor: 231331701004041 sebesar Rp45.111.000,00.

Tabel 26
Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Aset Tetap Renovasi	8	1.232.250.085,00
2	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.754	611.685.312,00
3	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	8	539.189.000,00
4	Kartografi, Naskah dan Lukisan	9	45.785.520,00
Jumlah			2.428.909.917,00

Selain itu, terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi di Komisi Yudisial RI adalah kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023 yang belum diserahterimakan kepada pemilik kantor penghubung yang telah ditempati Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI berdasarkan Surat Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah dan rumah dinas Pejabat Negara milik Kementerian Sekretariat Negara.

Tabel 27
Rincian Aset Tetap Renovasi

(dalam rupiah)

No	Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi	Nilai
1	TA 2023 Kemensekneg di Jakarta	320.164.750,00
2	TA 2022 Kemensekneg di Jakarta	311.351.805,00
3	TA 2021 PKY di Sumatera Selatan	94.997.707,00
4	TA 2019 PKY di Nusa Tenggara Barat	172.689.000,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi	Nilai
5	TA 2018 PKY di Kalimantan Timur	106.067.500,00
6	TA 2018 PKY di Nusa Tenggara Barat	124.200.520,00
7	TA 2016 PKY di Sumatera Utara	102.778.803,00
Jumlah		1.232.250.085,00

Tabel 28
Rincian Koreksi Pencatatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 2023 Kemensekneg di Jakarta ke Gedung Bangunan Komisi Yudisial	45.111.000,00
2	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 2021 PKY di Nusa Tenggara Timur ke Gedung Bangunan Kantor Wilayah Penghubung Nusa Tenggara Timur	145.750.000,00
3	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 2019 PKY di Jawa Tengah ke Gedung Bangunan Kantor Wilayah Penghubung Jawa Tengah	117.079.000,00
4	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 2017 PKY di Nusa Tenggara Timur ke Gedung Bangunan Kantor Wilayah Penghubung Nusa Tenggara Timur	58.122.448,00
Jumlah		366.062.448,00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan
(Rp65.261.101.240,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah (Rp65.261.101.240,00) dan (Rp62.444.756.140,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 29
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Akm. Penyusutan
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(46.362.767.627,00)
3	Gedung dan Bangunan	(14.895.991.584,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.496.606.206,00)
5	Aset Tetap Lainnya	(505.735.823,00)
Jumlah		(65.261.101.240,00)

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp2.815.724.708,00

Saldo Aset Lainnya Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.815.724.708,00 dan Rp148.751.425,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Komisi Yudisial RI terdiri dari Aset Tak Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp2.165.701.060,00

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.165.701.060,00 dan Rp2.165.701.060,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	2.165.701.060,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	2.165.701.060,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2.057.045.110,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	108.655.950,00

Tabel 31
Rincian Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Jumlah
1	Software	215	1.948.233.800,00
2	Lisensi	54	123.616.760,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	93.850.500,00
Jumlah			2.165.701.060,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana di Rekening
Penampungan-
Kementerian/ Lembaga

Nilai Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.696.802.508,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Rp2.696.802.508,00

dan Rp0,00. Rekening penampungan Kementerian/ Lembaga di Komisi Yudisial disebabkan kontrak yang berita acara serah terima pekerjaan (BAST) pada tanggal 31 Desember 2023. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga terdiri dari:

- a. Penampungan RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Perawatan Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 Nomor: 001/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp342.937.751,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 Nomor: 00603/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, Nomor: 231330301000029 sebesar Rp0,00;
- b. Penampungan RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 Nomor: 002/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp655.426.757,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 Nomor: 00604/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, Nomor: 231330301000030 sebesar Rp0,00;
- c. Penampungan RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor: 003/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp208.438.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 Nomor: 00605/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, Nomor: 231330301000031 sebesar Rp0,00;
- d. Penampungan RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan Internet (Dedicated Mix 450 MBPS) Tahun 2023 Nomor: 001/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp294.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 Nomor: 00606/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, Nomor: 231330301000120 sebesar Rp0,00;
- e. Penampungan RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial Dan Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2023 Nomor: 004/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp696.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 Nomor: 00607/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Desember 2023, Nomor: 231330301000119 sebesar Rp0,00;

- f. Penampungan RPATA atas Kontrak Langganan Backup Data Dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun 2023 Nomor: 006/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp500.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 Nomor: 00608/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, Nomor: 231330301000121 sebesar Rp0,00.

C.3.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Rp2.748.463.716,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.748.463.716,00 dan Rp583.638.380,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN (aset tetap dan aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan dalam operasional Komisi Yudisial).

Tabel 32
Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	583.638.380,00
Mutasi Tambah:	0,00
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	2.393.622.651,00
Mutasi Kurang:	0,00
Usulan Penghapusan	(228.797.315,00)
Saldo per 31 Desember 2023	2.748.463.716,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(583.638.380,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	2.164.825.336,00

Tabel 33
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Kantor	12	89.182.280,00
2	Alat Rumah Tangga	146	775.072.666,00
3	Alat Studio	14	159.399.300,00
4	Alat Komunikasi	13	43.132.515,00
5	Alat Kedokteran	1	1.835.000,00
6	Unit Alat Laboratorium	1	3.500.000,00
7	Alat Khusus Kepolisian	4	6.820.000,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
8	Komputer Unit	102	1.053.612.310,00
9	Peralatan Komputer	34	231.567.260,00
10	Alat Kerja Penerbangan	5	29.501.320,00
Jumlah			2.393.622.651,00

Tabel 34
Usulan Penghapusan

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Kantor	2	2.805.000,00
2	Alat Rumah Tangga	17	54.615.140,00
3	Alat Studio	2	23.175.600,00
4	Alat Komunikasi	1	318.255,00
5	Alat Kedokteran	10	118.340.000,00
6	Unit Alat Laboratorium	4	18.817.000,00
7	Alat Khusus Kepolisian	2	10.726.320,00
Jumlah		38	228.797.315,00

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
(Rp4.795.242.576,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp4.795.242.576,00) dan (Rp2.600.588.015,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 35
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Akm Penyusutan
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(2.154.559.086,00)
2	Akumulasi Amortisasi Software	(1.948.233.800,00)
3	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(108.811.310,00)
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(583.638.380,00)
Jumlah		(4.795.242.576,00)

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp3.187.050.408,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.187.050.408,00 dan Rp292.847.417,00.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.923.945.008,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.923.945.008,00 dan Rp271.727.085,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari:

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp219.312.500,00 terdiri dari:
 - a. Beban Langganan Listrik Kantor Komisi Yudisial Tahun 2023 senilai Rp177.933.357,00;
 - b. Beban Langganan Indihome Komisi Yudisial Tahun 2023 senilai Rp10.887.627,00;
 - c. Beban Langganan Listrik Kantor Penghubung Tahun 2023 senilai Rp8.133.920,00;
 - d. Beban Langganan Indihome Kantor Penghubung Tahun 2023 senilai Rp7.710.456,00;
 - e. Beban Langganan Telepon Kantor Penghubung Komisi Yudisial senilai Rp1.115.447,00;
 - f. Beban Langganan Air Kantor Penghubung Komisi Yudisial senilai Rp3.331.693,00;
 - g. Beban Pemeliharaan Lingkungan Penghubung Komisi Yudisial senilai Rp10.200.000,00.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, pemerintah

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA). Di Komisi Yudisial RPATA senilai Rp2.696.802.508,00 terdiri dari:

- a. RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Perawatan Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 Nomor: 001/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp342.937.751,00;
- b. RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 Nomor: 002/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp655.426.757,00;
- c. RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Nomor: 003/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp208.438.000,00;
- d. RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan Internet (Dedicated Mix 450 MBPS) Tahun 2023 Nomor: 001/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp294.000.000,00;
- e. RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial Dan Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2023 Nomor: 004/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp696.000.000,00;
- f. RPATA atas Kontrak Langganan Backup Data Dan Aplikasi Nomor: 006/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp500.000.000,00.

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan Diterima
diMuka
Rp117.823.833,00*

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp117.823.833,00 dan Rp21.120.332,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

tahun.

Rincian Pendapatan Di Terima Dimuka yaitu berupa Pendapatan diterima dimuka berupa Sewa Tanah sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp96.628.500,00. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan untuk ATM dan Kantor BRI di Gedung Komisi Yudisial Perjanjian Nomor: PERJ-02/BU.KY/09/2022 tanggal 26 September 2022 adendum pertama sewa menyewa sebagian gedung untuk kantor kas dan ATM BRI Nomor: PERJ-03/BU.KY/02/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan periode sewa 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp193.257.000,00;
2. Gedung dan Bangunan untuk Kantin Komisi Yudisial sebesar Rp21.195.333,00 sesuai Perjanjian Nomor: PERJ-01/BU.KY/09/2023 tanggal 01 September 2023. dengan periode sewa 1 September 2023 s.d. 31 Agustus 2024 dengan nilai kontrak sebesar 31.793.000,00.

C.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp145.281.567,00*

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp145.281.567,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat beberapa kendala dalam proses penyetoran.

C.5 Ekuitas

*Ekuitas
Rp389.372.908.295,00*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp389.372.908.295,00 dan Rp382.212.647.545,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp139.477.130,00

Jumlah Pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp139.477.130,00 dan Rp122.140.668,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp17.336.462,00 atau sebesar 14,19 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	128.346.499,00	116.860.668,00	9,83
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	11.130.631,00	5.280.000,00	110,81
Jumlah	139.477.130,00	122.140.668,00	14,19

Pendapatan negara bukan pajak akrual berasal dari:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp128.346.499,00 sebagai berikut:
 - a) Sewa Kantor BRI dan ATM periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp96.628.500,00, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.02/BU.KY/09/2022 periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp193.257.000,00;
 - b) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Agustus 2023 sebesar Rp21.120.332,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/08/2022 periode 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp31.680.500,00;

- c) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 September 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp10.597.667,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/09/2023 periode 1 September 2023 s.d. 31 Agustus 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp31.793.000,00.

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp11.130.631,00 sebagai berikut:

- a) Pendapatan denda sesuai Kontrak Nomor: 577/PERJ/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 08 Desember 2023 senilai Rp10.256.757,00;
- b) Pendapatan denda sesuai Kontrak Nomor: 712/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp873.874,00.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp41.168.019.178,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.168.019.178,00 dan Rp36.348.917.020,00. Saldo beban pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.819.102.158,00 atau sebesar 13,26 persen dari tahun sebelumnya. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Catatan:

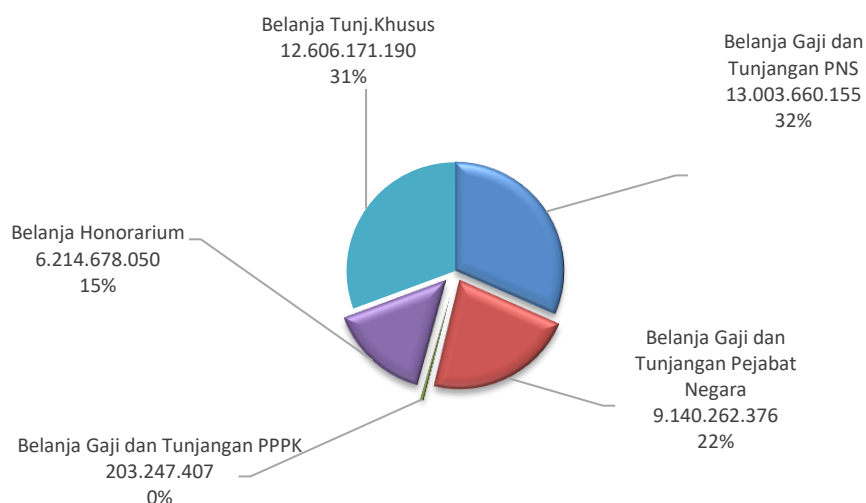
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tabel 37
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13.003.660.155,00	12.649.794.160,00	2,80
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	9.140.262.376,00	9.149.525.520,00	(0,10)
Belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tunjangan PPPK	203.247.407,00	0,00	~
Belanja Honorarium	6.214.678.050,00	3.669.603.640,00	69,36
Belanja Tunj.Khusus	12.606.171.190,00	10.879.993.700,00	15,87
Jumlah	41.168.019.178,00	36.348.917.020,00	13,26

Grafik 8
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023



Beban Persediaan
Rp1.754.621.495,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.754.621.495,00 dan Rp1.725.042.288,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp29.579.207,00 atau sebesar 1,71 persen dari tahun sebelumnya. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai

Catatan:

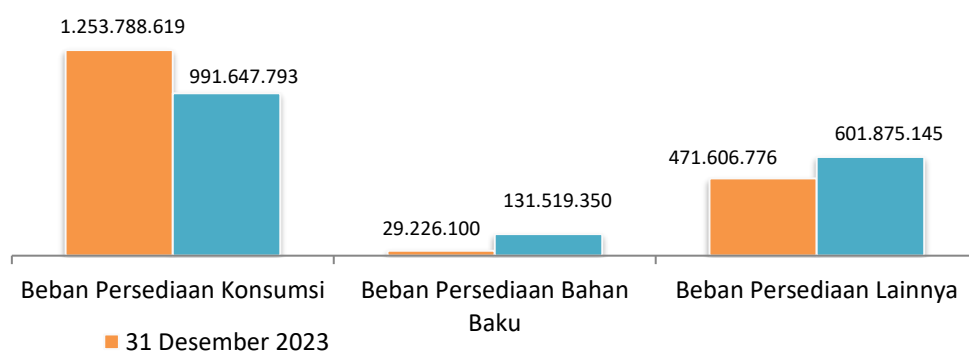
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

berikut:

Tabel 38
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.253.788.619,00	991.647.793,00	26,43
Beban Persediaan Bahan Baku	29.226.100,00	131.519.350,00	(77,78)
Beban Persediaan Lainnya	471.606.776,00	601.875.145,00	(21,64)
Jumlah Beban Persediaan	1.754.621.495,00	1.725.042.288,00	1,71

Grafik 9
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022



D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp63.178.909.049,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.178.909.049,00 dan Rp58.063.593.261,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp5.115.315.788,00 atau sebesar 8,81 persen dari tahun sebelumnya, kenaikan beban barang dan jasa terjadi karena penambahan 8 kantor Penghubung baru, sehingga terdapat penambahan biaya sewa kantor penghubung baru, listrik, air dan keperluan perkantoran. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tabel 39
Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

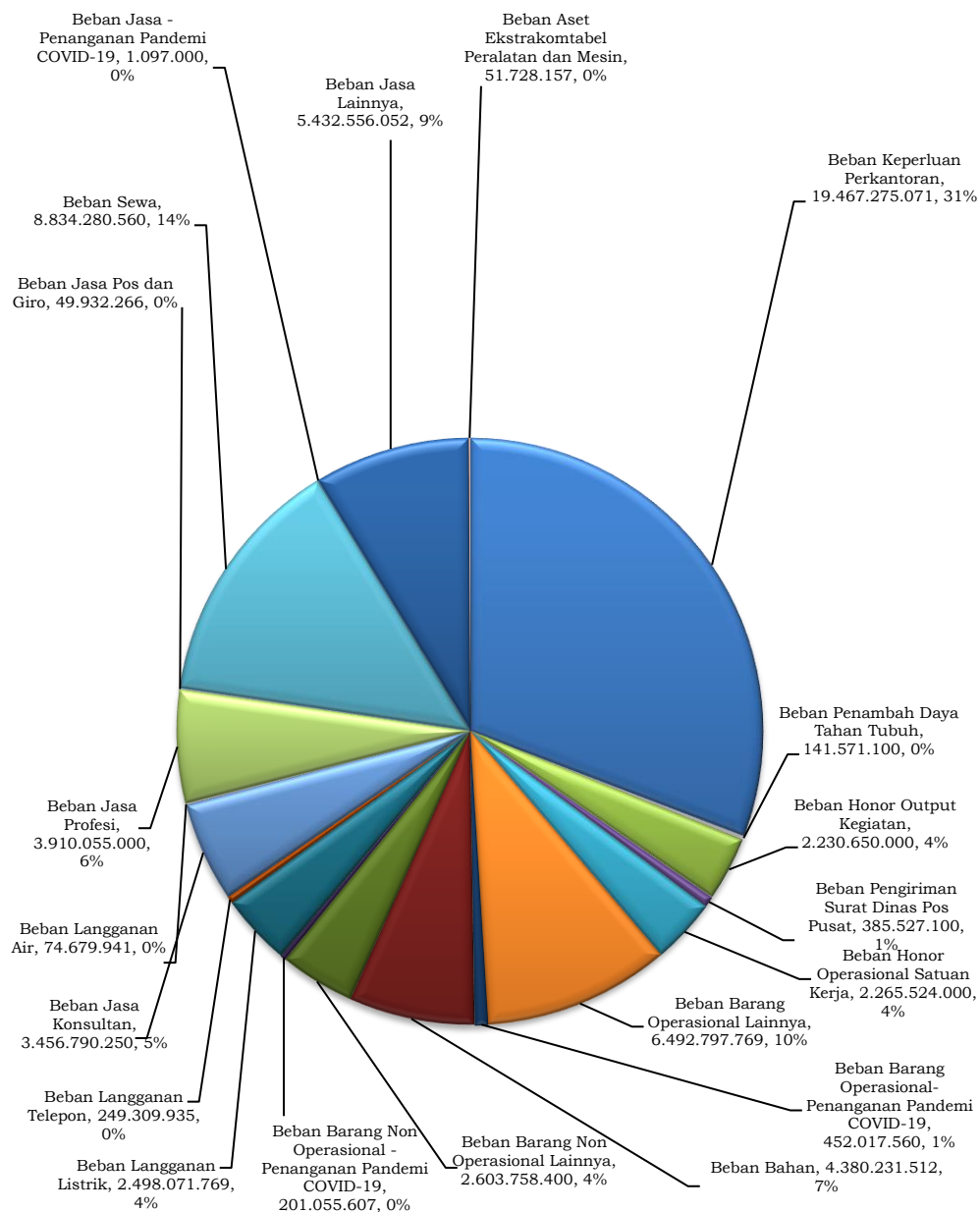
Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	19.467.275.071,00	14.232.832.055,00	36,78
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	141.571.100,00	720.580.317,00	(80,35)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	385.527.100,00	594.488.758,00	(35,15)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.265.524.000,00	2.211.786.000,00	2,43
Beban Barang Operasional Lainnya	6.492.797.769,00	6.561.184.909,00	(1,04)
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	452.017.560,00	1.747.644.164,00	(74,14)
Beban Bahan	4.380.231.512,00	2.682.305.293,00	63,30
Beban Honor Output Kegiatan	2.230.650.000,00	2.134.290.000,00	4,51
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.603.758.400,00	4.797.362.766,00	(45,73)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	201.055.607,00	82.215.000,00	144,55
Beban Langganan Listrik	2.498.071.769,00	2.039.793.138,00	22,47
Beban Langganan Telepon	249.309.935,00	302.743.174,00	(17,65)
Beban Langganan Air	74.679.941,00	55.276.498,00	35,10
Beban Jasa Pos dan Giro	49.932.266,00	94.041.900,00	(46,90)
Beban Jasa Konsultan	3.456.790.250,00	148.996.000,00	2.220,06
Beban Sewa	8.834.280.560,00	6.690.502.193,00	33,07
Beban Jasa Profesi	3.910.055.000,00	5.193.700.000,00	(24,72)
Beban Jasa Lainnya	5.432.556.052,00	6.855.846.923,00	(20,76)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.097.000,00	829.752.421,00	(99,87)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	51.728.157,00	88.251.752,00	(41,39)
Jumlah	63.178.909.049,00	58.063.593.261,00	8,93

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 10

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023



D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp10.476.143.739,00

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.476.143.739,00 dan Rp8.335.378.617,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp2.140.765.122,00 atau sebesar 25,68 dari tahun sebelumnya. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Catatan:

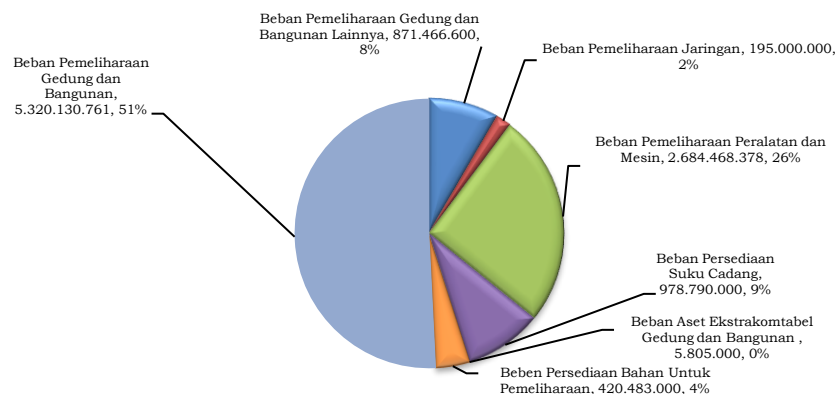
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Tabel 40
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.320.130.761,00	4.203.873.475,00	26,55
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	871.466.600,00	149.375.675,00	485,25
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.684.468.378,00	2.982.485.583,00	-9,99
Beban Pemeliharaan Jaringan	195.000.000,00	196.500.000,00	-0,76
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	420.483.000,00	72.550.484,00	479,57
Beban Persediaan Suku Cadang	978.790.000,00	712.486.500,00	37,33
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	5.805.000,00	18.106.900,00	-67,94
Jumlah	10.476.143.739,00	8.335.378.617,00	25,71

Grafik 11
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023



D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp48.968.019.490,00

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp48.968.019.490,00 dan Rp44.515.612.580,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp4.452.406.910,00 atau sebesar 10,00 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terdapat blokir *Automatic Adjustment* sebagian besar adalah perjalanan dinas dalam negeri, tetapi sampai

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

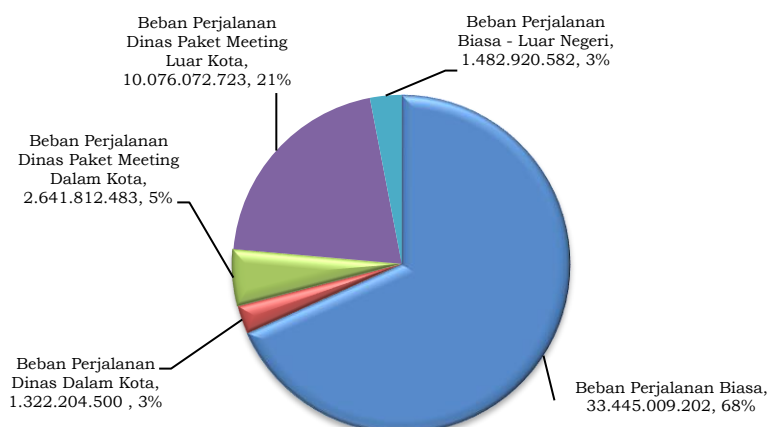
akhir tahun belanja perjalanan dinas dalam negeri masih tetap terblokir. Berbeda dengan tahun 2023, Komisi Yudisial terdapat blokir *Automatic Adjustment* perjalanan dinas dalam negeri, namun sampai akhir tahun sudah terbuka blokir *Automatic Adjustment*. Kondisi ini yang menyebabkan secara tidak langsung belanja perjalanan dinas tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	33.445.009.202,00	31.428.366.023,00	6,42
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.322.204.500,00	1.048.655.760,00	26,09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.641.812.483,00	2.126.516.696,00	24,23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.076.072.723,00	9.274.697.364,00	8,64
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.482.920.582,00	368.797.250,00	302,10
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	268.579.487,00	(100,00)
Jumlah	48.968.019.490,00	44.515.612.580,00	(10,00)

Grafik 12
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp1.289.917.300,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.289.917.300,00 dan Rp1.744.312.200,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp454.394.900,00 atau sebesar 26,05 persen dari tahun sebelumnya. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	1.289.917.300,00	1.744.012.200,00	(26,04)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	300.000,00	(100,00)
Jumlah	1.289.917.300,00	1.744.312.200,00	(26,05)

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.556.564.436,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.556.564.436,00 dan Rp5.072.162.087,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp484.402.349,00 atau sebesar 9,55 persen dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

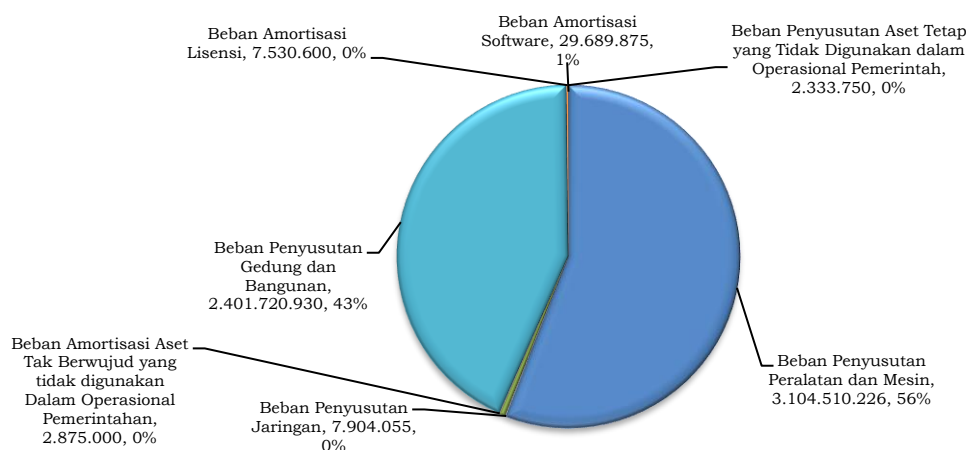
Tabel 43
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.104.510.226,00	2.555.701.589,00	21,47
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.401.720.930,00	2.319.220.026,00	3,56
Beban Penyusutan Jaringan	7.904.055,00	7.904.055,00	0,00
Beban Amortisasi Software	29.689.875,00	156.898.923,00	(81,08)
Beban Amortisasi Lisensi	7.530.600,00	20.592.520,00	(63,43)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	2.875.000,00	0,00	~
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.333.750,00	11.844.974,00	(80,30)
Jumlah	5.556.564.436,00	5.072.162.087,00	9,55

Grafik 13

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023



D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp818.196.810,00

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp818.196.810,00 dan Rp304.826.806,00. Pendapatan PNPB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena pemakaian dan faktor usia barang.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp2.145.264,00

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.145.264,00 dan Rp385.009.106,00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya aset tetap.

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp5.629.659.255,00

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.629.659.255,00 dan Rp74.504.339,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp39.513.820,00;
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp173.907.435,00;
3. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp5.416.238.000,00.

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp73.079.848,00

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp73.079.848,00 dan dan Rp2.983.014,00.

D.13. Surplus / (Defisit) - LO

Surplus/ (Defisit) - LO
(Rp165.880.086.604,00)

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp165.880.086.604,00) dan (Rp155.691.538.360,00)

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal
Rp382.212.647.545,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp382.212.647.545,00 dan Rp365.346.957.757,00.

Defisit LO
(Rp165.880.086.604,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus / Defisit-LO untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing defisit sebesar (Rp165.880.086.604,00) dan (Rp155.691.538.360,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp324.717.724,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp324.717.724,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar Entitas
Rp173.089.566.085,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp173.089.566.085,00 dan Rp172.559.178.148,00. Rincian Nilai

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp174.281.300.281,00
2. Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp1.267.798.696,00)
3. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp76.064.500,00

Ekuitas Akhir

Rp389.746.844.750,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp389.746.844.750,00 dan Rp382.212.647.545,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka belanja penanganan COVID-19 pada Kantor Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19
Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	459.518.000,00	452.017.560,00	98,37
Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	201.060.000,00	201.055.607,00	100,00
Belanja Barang persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	34.597.000,00	1.097.000,00	3,71
Total Belanja Kotor	911.275.000,00	654.170.167,00	94,10
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	~
Jumlah	911.275.000,00	654.170.167,00	94,10

Nilai belanja penanganan pandemi Covid-19 pada tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp410.780.535,00 dan pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp654.170.167,00. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penggunaan Akun Khusus Covid-19, Komisi Yudisial belum sepenuhnya melakukan revisi anggaran dikarenakan masih ada tagihan dari pihak ketiga dalam penagihan belanja menggunakan akun Covid-19, tagihan disemester II senilai Rp243.389.632,00.

F.2. Transfer Masuk dari Komisi Pemberantas Korupsi

Transfer Masuk merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lainnya. Komisi Yudisial RI mendapat Transfer Masuk dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berupa 2 (dua) bidang tanah dan Rumah Kantor di Surabaya Jawa Timur. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara pada Komisi Yudisial sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor.139/KM.6/2022 tanggal 12 September 2022 dan pencatatan aset tetap ini dicatat dikodefikasi Tanah.

Saat ini Komisi Yudisial sudah melakukan Permintaan Pemisahan Nilai Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan Nomor 139/UM/PK.05/03/2023 tanggal 17 Maret 2023, dan sudah mendapat tanggapan balasan dari KPKNL Surabaya No.S-2149/KNL.1001/2023 tentang Tindak Lanjut Permintaan Pemisahan Nilai Aset Tetap Berupa Tanah dan Bangunan oleh Komisi Yudisial, dalam isi surat tersebut KPKNL Surabaya merujuk pada Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penilaian BMN dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan oleh Penilai Pemerintah pada Kantor Pelayanan berdasarkan kedudukan Kuasa Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Kemudian Komisi Yudisial meminta bantuan melalui kepada KPKNL Jakarta II melalui Surat Nomor: 119/SET/PK.05/04/2023 tanggal 06 April 2023 dan telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Jakarta II melalui surat No.S-1371/KNL.0702/2023 Tanggal 12 April 2023 tentang Pemberitahuan Penilaian Barang Milik Negara Eks Rampasan KPK pada Komisi Yudisial RI bahwa Lokasi Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dilakukan penilaian berada di wilayah kerja KPKNL Surabaya, maka survei lapangan dan proses penilaian atas BMN akan dilaksanakan oleh Tim Penilai KPKNL

Surabaya. Bahwa terkait hal tersebut diatas, Tim KPKNL Surabaya sudah melakukan penilaian atas kedua obyek tersebut. Dan terdapat kendala yaitu perbedaan luas tanah dan bangunan antara luas tanah dan bangunan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan luas tanah dan bangunan yang diukur oleh KPKNL, dan sudah ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh BPN, KPK dan KPKNL.

Komisi Yudisial bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dimana hasil koordinasi tersebut akan dilakukan pengukuran ulang atas luasan obyek tanah. Hasil pengukuran Kantor Pertanahan Surabaya ini akan dijadikan sebagai dasar penilaian kembali yang dilakukan oleh KPKNL Surabaya. Kendala yang dihadapi saat ini adalah penentuan batas – batas obyek tanah, hal ini dikarenakan tidak kooperatifnya pihak Pengelola (obyek tanah merupakan ruko di kompleks perumahan dibawah pengelolaan PT. Tjakra Multi Strategi). Pengelola (PT. Tjakra Multi Strategi) diperlukan sebagai saksi terkait batas-batas obyek tanah guna proses pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Surabaya. Menindaklanjuti kendala tersebut, Komisi Yudisial akan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Surabaya dan pihak Kelurahan dimana obyek tanah berada untuk mempercepat proses pengukuran kembali yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Komisi Yudisial bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya telah melakukan pengukuran ulang atas aset tersebut. Berdasarkan pengukuran dan penelusuran yang dilakukan Komisi Yudisial dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya telah terbit Peta Bidang yang menggambarkan luas aset dan diketahui bahwa aset atau tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 5 (lima) sertifikat tanah.

Mendasarkan hal tersebut diatas, masih terdapat permasalahan dimana merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KM.6/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Pada Komisi Yudisial dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA-09/Ek.11/26/12/2022 – 02/PB/PK.01.02/12/2022 tertanggal 13

Desember 2022 aset yang dikuasai oleh Komisi Yudisial hanya sebagian dari keseluruhan bangunan yang telah diserahkan kepada Komisi Yudisial sebagaimana Peta Bidang yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 26 September 2023.

Pada tanggal 09 Januari 2024, Kantor Pertanahan Kota Surabaya telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan terkait bidang tanah ini. Dimana Surat Keputusan tersebut sebagai dasar pendaftaran sertifikat tanah. Kemudian pada akhir bulan Januari 2024 Kantor Pertanahan Kota Surabaya kembali menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang akan dipergunakan untuk penerbitan Sertifikat Tanah *a quo*.

F.3. Hibah

Pada Tahun 2023 Komisi Yudisial menerima Hibah Tanah, Gedung dan Bangunan dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Naskah Hibah Gubernur Jawa Tengah Nomor: 030/0001825 dan Komisi Yudisial Nomor: 01/PKS/PK.02.02/02/2023, Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 030/0001826 dengan Komisi Yudisial RI Nomor: 01/BAST/SET/PK.02.01/02/2023. Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berupa tanah seluas 354 m² senilai Rp70.259.500,00 dan bangunan seluas 116 m² senilai Rp5.805.000,00 terletak di Jalan Pamularsih No.10 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 nilai satuan minimum kapitalisasi Barang Milik Negara sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 untuk Gedung dan Bangunan, sehingga pencatatan di catat dalam akun 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan.

F.4. Perolehan Lainnya

Kementerian Keuangan memberikan Komisi Yudisial berupa Tanah dan Bangunan sesuai BAST Nomor: BA-46/KN/2023 tanggal 06 Juni 2023 berupa tanah di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai Laporan

Penilaian Nomor: Lap-0437/1/PRO-01/KNL.0702/01.01.00/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tanah senilai 254m² senilai Rp3.815.949.000,00 dan bangunan senilai 855m² senilai Rp1.600.289.000,00.

F.5. Kegiatan Prioritas Nasional

Komisi Yudisial RI mendapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII yang memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mendukung prioritas nasional (PN) VII adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Hakim dan Klinik Etik

Terselesaikannya (terbitnya hasil sidang pleno) sejumlah 20 kegiatan penanganan Perbuatan Merendahkan Keluhuran Martabat Hakim, Observasi Penerapan Sistem Pengamanan dan Keamanan Persidangan dilaksanakan 2 kegiatan, 9 laporan pelaksanaan program klinik etik dengan 9 mitra Perguruan Tinggi, Telah dilaksanakan 4 kegiatan Sinergitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum, Siniar telah dilaksanakan 2 kegiatan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Biro BRAP 3 kegiatan.

2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan

Hakim yang telah mendapatkan pelatihan dari Komisi Yudisial sejumlah 600 Hakim terdiri dari: Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY, Pelatihan Pemantapan KEPPH, Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun, Pelatihan Tematik “Hukum Pajak” Bagi Hakim Pajak, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim.

3. Pengembangan Integritas Hakim

Telah dilaksanakan FGD terkait pengembangan desain dan tool survei integritas hakim, telah dilaksanakan jasa konsultasi survei integritas hakim, melakukan korespondensi dengan Mahkamah Agung terkait responden data hakim, pembuatan dan tersebarnya peningkatan pemahaman publik tentang integritas hakim melalui Film Pendek dan media sosial, monitoring kegiatan Survei Integritas Hakim, kampanye

deseminasi hasil pengukuran Suvey Integritas Hakim melalui media sosial.

4. Penguatan Data Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Melakukan integrasi database rekam jejak hakim, sampai dengan bulan September 2023 diperoleh database rekam jejak hakim terintegrasi sebanyak 838 data hakim, pembentukan dan pembinaan informan strategis dalam rangka pelaksanaan profiling hakim berkelanjutan, melakukan pemetaan dalam rangka profiling terhadap calon-calon hakim agung potensial, *Updating* dan pemutakhiran *database* rekam jejak hakim.

F.6. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Di Komisi Yudisial terdapat rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) senilai Rp2.696.802.508,00 dan sudah dilakukan pembayaran sebagai berikut:

- a. Penampungan RPATA atas Kontrak Nomor: 001/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp342.937.751,00, sesuai SPM Tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 00007/KYRI/2023, SP2D Tanggal 11 Januari 2024, Nomor:249991303003937 sebesar Rp342.937.751,00,;
- b. Penampungan RPATA atas Kontrak Nomor: 002/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp655.426.757,00, sesuai SPM Tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 00008/KYRI/2023, SP2D Tanggal 11 Januari 2024, Nomor: 231330301000030 sebesar Rp655.426.757,00;
- c. Penampungan RPATA atas Kontrak Nomor: 003/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp208.438.000,00, sesuai SPM Tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 0009/KYRI/2024, SP2D Tanggal 11 Januari 2024, Nomor:249991303003938 sebesar Rp208.438.000,00;
- d. Penampungan RPATA atas Kontrak Nomor: 001/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp294.000.000,00, sesuai SPM

Tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 00010/KYRI/2023, SP2D
 Tanggal 11 Januari 2024, Nomor: 249991303004017 sebesar
 Rp294.000.000,00;

e. Penampungan RPATA atas Kontrak Nomor: 004/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp696.000.000,00, sesuai SPM
 Tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 00011/KYRI/2023, SP2D
 Tanggal 11 Januari 2024, Nomor: 249991303003971 sebesar
 Rp696.000.000,00;

f. Penampungan RPATA atas Kontrak Nomor: 006/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp500.000.000,00, sesuai SPM
 Tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 00012/KYRI/2023, SP2D
 Tanggal 11 Januari 2024, Nomor: 249991303004018 sebesar
 Rp500.000.000,00.

F.7. Transaksi Resiprokal

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja- Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.

Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun tibal timbal balik telah diatur dalam PMK 232/PMK.05/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi. Transaksi resiprokal di Komisi Yudisial berupa Pembayaran:

1. Diklat Teknis Penyusutan Arsip Angkatan II Tahun 2023 tgl 10 s.d. 14 April 2023 a.n. Linda Oktaviani Adam dengan nomor SP2D

Nomor: 231331301013921 tanggal 17 April 2023, Satker Intraco 418934 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan senilai Rp3.080.000,00;

2. Penyelenggaraan Program Kemitraan Analisis Putusan Antara Komisi Yudisial RI dan Universitas Sriwijaya sesuai kontrak Nomor: 938/SPK/PPK-4.KY/07/2023 SP2D Nomor: 231331701002279 tanggal 01 Desember 2023, Satker Intraco 677515 Universitas Sriwijaya senilai netto Rp73.500.000,00;
3. Penyelenggaraan Program Kemitraan Klinik Etik dan Advokasi antara Komisi Yudisial RI dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 Nomor:09C/SPS/PPK-2.KY/03/2023 SP2D Nomor: 231331701002278 tanggal 01 Desember 2023, Satker Intraco 677515 Universitas Sriwijaya senilai netto Rp68.600.000,00.

F.8. Pergantian Pimpinan Komisi Yudisial Paruh Kedua Juli 2023 s.d. Desember 2025

Rapat Pemilihan Pimpinan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 telah menetapkan Pimpinan Komisi Yudisial Paruh Kedua (Juli 2023 s.d. Desember 2025) dengan susunan Pimpinan sebagai berikut:

Ketua	: Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Wakil Ketua	: Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim	: Drs. M. Taufiq HZ, M.HI
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim	: Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan	: Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	: Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi	: Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Jakarta, 7 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA